

SKRIPSI

**DINAMIKA KEDUDUKAN DAN FUNGSI KOMISI NASIONAL ANTI
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

EHSANIA FAJAR

1910113048

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :

**kepada Ibu Arfiani, S.H., M.H.
Beni Kharisma Arrasuli, SH.I, LL.M.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

DINAMIKA KEDUDUKAN DAN FUNGSI KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA

ABSTRAK

Lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara. lembaga negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan lembaga negara yang wewenangnya tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu lembaga negara yang wewenangnya tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau kewenangannya berdasarkan peraturan lain adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor. 181 Tahun 1998 dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor. 65 Tahun 2005. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan suatu lembaga yang didirikan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia Perempuan di Indonesia. Kedudukan dan fungsi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai delegasi untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dianggap tidak efektif dalam mengatasi masalah. Oleh karena itu rumusan masalah yang peneliti lakukan terbagi menjadi dua yaitu, *pertama* Bagaimana dinamika kedudukan dan fungsi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia? *Kedua*, Bagaimana kedudukan dan fungsi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang ideal di masa yang akan datang? Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Yuridis Normatif, pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah, *pertama* dinamika kedudukan dan fungsi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai lembaga independen bekerja menemukan pola baru kekerasan terhadap perempuan dan terus melakukan penyempurnaan secara terus menerus agar bisa menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik dari tahun ke tahun, *kedua* kedudukan fungsi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang ideal untuk masa depan dengan memperkuat landasan yuridis bagi lembaga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Undang-Undang khusus. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan membentuk kantor perwakilan di daerah luar Ibu Kota dan lebih aktif lagi bekerjasama dengan pemerintah dan organisasi-organisasi yang ada dalam masyarakat.